

***AGREEMENT THE PLACEMENT AND PROTECTION OF INDONESIAN
DOMESTIC WORKERS* ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN
ARAB SAUDI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI DI
ARAB SAUDI**

JURNAL ILMIAH

Oleh :

WIDAD MUHAMMAD KHAITAM

NIM: 0910113201



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM *AGREEMENT THE PLACEMENT AND PROTECTION OF INDONESIAN DOMESTIC WORKERS* ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN ARAB SAUDI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI DI ARAB SAUDI

Identitas Penulis :

- a. Nama : Widad Muhammad Khaitam**
- b. NIM : 0910113201**
- c. Konsentrasi : Hukum Internasional**

Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal : 10 November 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ikaningtyas, SH., LL.M

NIP. 19810531 200501 2 002

Dr. Patricia Audrey Ruslijanto, SH., M.Kn

NIP. 19850101 200912 2 005

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Internasional

Nurdin, SH., M.Hum

NIP. 19561207 198601 1 001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Brawijaya, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widad Muhammad Khaitam

Nim : 0910113201

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas/Konsentrasi : Hukum Internasional

Jenis Karya : Artikel Ilmiah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Brawijaya, **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul:

AGREEMENT THE PLACEMENT AND PROTECTION OF INDONESIAN DOMESTIC WORKERS ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN ARAB SAUDI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI DI ARAB SAUDI.....

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** ini Universitas Brawijaya berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Malang

Pada tanggal : 1 Desember 2014

Yang menyatakan,

(Widad Muhammad Khaitam)

***AGREEMENT THE PLACEMENT AND PROTECTION OF INDONESIAN
DOMESTIC WORKERS* ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN
ARAB SAUDI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI DI
ARAB SAUDI**

Widad Muhammad Khaitam, Ikaningtyas, SH. LLM, Dr. Patricia Audrey, SH.
MKn.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

0910113201@ub.ac.id

abstrak

Pada tanggal 19 Februari 2014 Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi telah menandatangani *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* untuk melindungi hak TKI di Arab Saudi. Setelah berlakunya *agreement*, jumlah TKI Di Arab Saudi yang bermasalah sampai dengan Bulan Agustus 2014 sebanyak 630 kasus. Oleh karena itu penelitian ini untuk menganalisis kekuatan hukum dari *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestik Workers* dan perlindungan hukum terhadap TKI di Arab Saudi berdasarkan *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan metode pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian, *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan dalam hal perlindungan hukum terhadap TKI di Arab Saudi, *agreement* tersebut belum memberikan perlindungan hukum secara maksimal dengan tidak adanya jaminan TKI atas kekerasan fisik atau penyiksaan, perbudakan, kesehatan, hak berorganisasi serta kepengurusan TKI *overstayers* dan TKI meninggal.

Kata Kunci: Perlindungan, *Agreement*, TKI

**AGREEMENT THE PLACEMENT AND PROTECTION OF
INDONESIAN DOMESTIC WORKERS BETWEEN THE REPUBLIC OF
INDONESIA WITH SAUDI ARABIA IN THE LEGAL PROTECTION OF
INDONESIAN MIGRAN WORKERS IN SAUDI ARABIA**

Widad Muhammad Khaitam, Ikaningtyas, SH. LLM, Dr Patricia Audrey, SH.
Mkn.

Brawijaya University Faculty of Law

0910113201@ub.ac.id

abstract

On 19 February 2014 the Government of Indonesia and Saudi Arabia have signed an Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers to protect the rights of migrant workers in Saudi Arabia. After the entry into force of the agreement, the number of Indonesian migrant workers in Saudi Arabia who have problems with the Moon in August 2014 to 630 cases. Therefore this study to analyze the legal force of agreement the placement and protection of Indonesian Domestic Workers and the legal protection of Indonesian migrant workers in Saudi Arabia based on agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers. This research was conducted with the study of literature with the approach and comparative law. based on the results of the research, Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers have binding legal force. Meanwhile in terms of legal protection of Indonesian migrant workers in Saudi Arabia, the agreement has not given legal protection to the maximum with no guarantee of Indonesian migran worker on physical violence or torture, slavery, health, the right to organize, management of migrant workers and migrant workers died.

Keywords: Protection, Agreement, Indonesian Migran Worker

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kerajaan Saudi Arabia merupakan salah satu negara yang diminati TKI dalam mencari pekerjaan karena adanya kesamaan agama, kemudahan untuk menjalankan ibadah haji/umroh serta upah yang memadai di bandingkan bekerja di dalam negeri. Hal ini terbukti dengan besarnya jumlah TKI di Kerajaan Saudi Arabia sampai dengan saat ini mencapai angka 1,4 juta jiwa. Mereka umumnya bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang rentan dengan permasalahan, mulai dari gaji tidak dibayar, penganiayaan oleh majikan, sampai kasus kematian.¹

Dalam catatan Kementerian Luar Negeri (KEMLU) pada tahun 2012, kasus TKI di Arab Saudi yang ditangani oleh KEMLU menduduki peringkat tertinggi dibandingkan penempatan TKI lainnya dengan jumlah sebanyak 3670 kasus. Sedangkan di tahun 2013 permasalahan TKI di Arab Saudi mengalami penurunan sebanyak 49,23 persen yaitu sebanyak 1807 kasus dengan permasalahan kasus yang sama diantaranya gaji tidak dibayar, penyiksaan atau kekerasan fisik, pelecehan seksual beban kerja tidak sesuai, sakit dan lain-lain.²

Salah satu usaha pemerintah Indonesia untuk melakukan perlindungan TKI di Arab Saudi yaitu dengan membuat suatu perjanjian bilateral mengenai perlindungan TKI di Arab Saudi. Pada tanggal 19 februari 2014 delegasi pemerintah Indonesia Muhaimin Iskandar dengan delegasi Arab Saudi Adel M. Fakieh telah menandatangani *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* (persetujuan mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik). Setelah berlakunya *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*

¹ BNP2TKI, 2012, **RI - Arab Saudi Tandatangani MoU Perlindungan TKI** (online), <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/6284-ri-arab-saudi-tandatangani-mou-perlindungan-tki.html>, (31 agustus 2014).

² Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, **Statistik Penanganan Kasus** (online), http://perlindungan.kemlu.go.id/portal/shortcut/statistik_penanganan_kasus, (23 september 2014)

antar Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 19 februari 2014, TKI di Arab Saudi masih mengalami berbagai permasalahan. Dari awal tahun 2014 sampai dengan Agustus 2014 kemenlu masih menangani berbagai permasalahan TKI di Arab Saudi sebanyak 630 kasus³. Meskipun telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, data tersebut masih menunjukkan bahwa TKI di Arab Saudi masih cukup banyak yang mengalami berbagai permasalahan diantaranya penyiksaan atau kekerasan fisik oleh majikan, TKI ilegal, bahkan TKI terpidana mati.

Hal ini menjadi persoalan hukum yang timbul setelah berlakunya *agreement* tersebut. Dimana belum adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hukum bagi TKI yang bermasalah di Arab Saudi. Apa yang telah diharapkan dan dicita-citakan oleh kedua negara dengan adanya *agreement* tersebut masih belum tercapai dengan maksimal. Seharusnya, dengan adanya *agreement* tersebut dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak TKI di Arab Saudi. Permasalahan ini menjadi tanggung jawab kedua negara yang telah sepakat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap TKI di Arab Saudi melalui *agreement* tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian mengenai *agreement* tersebut dengan judul **Tinjauan Hukum *Agreement The Placement And Protection Of Indonesia Domestic Workers* antara Republik Indonesia dengan Arab Saudi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap TKI Di Arab Saudi.**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

³ Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementrian Luar Negeri, *op.cit.*

1. Mengapa *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional?
2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap TKI di Arab Saudi berdasarkan *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi sudah optimal?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum baik primer, sekunder, juga tersier diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap TKI. Penelusuran pustaka ini penulis lakukan di Pusat Dokumen dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang dan dengan media *online* melalui jaringan internet.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Kekuatan Hukum Dari *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional.

a. Pembuatan *Agreement* berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional

Dalam Konvensi Wina terdapat prosedur yang sama untuk penyusunan naskah perjanjian internasional. Langkah awal yang harus dilakukan oleh para pihak adalah melakukan penunjukan wakil-wakilnya yang telah diberikan surat kuasa (*full power*) untuk melakukan perundingan.

Full power menurut Konvensi Wina adalah suatu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang menunjuk satu atau beberapa utusan untuk mewakili negaranya dalam berunding, menerima atau membuktikan keaslian naskah suatu perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk diikat suatu perjanjian atau melaksanakan perbuatan lainnya sehubungan dengan suatu perjanjian.⁴ Pasal 7 ayat 1 Konvensi Wina 1969 berbunyi:

“A person is considered as representing a State for the purpose of adopting or authenticating the text of a treaty or for the purpose of expressing the consent of the state to be bound by a treaty if: (a) he produces appropriate full powers; or (b) it appears from the practice of the states concerned or from other circumstances that their intention was to consider that person as representing the state for such purposes and to dispense with full powers.”

“Seseorang dianggap sebagai mewakili Negara untuk tujuan mengadopsi atau mengotentifikasi teks sebuah perjanjian atau untuk tujuan mengungkapkan persetujuan dari negara untuk terikat dengan sebuah perjanjian apabila: (a) ia menghasilkan sesuai dengan kuasa penuh atau; (b) itu muncul dari praktek di Negara yang bersangkutan atau dari keadaan yang lain niat mereka adalah untuk mempertimbangkan orang itu mewakili Negara untuk persetujuan tersebut dan untuk mengeluarkan dengan kuasa penuh”.

Dalam praktik pembuatan *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*, yang ditunjuk untuk mewakili negara dalam melakukan perundingan dan penandatanganan adalah Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi Adel M. Fakieh. Tetapi dalam hal ini perwakilan Indonesia yaitu Muhaimin Iskandar tidak memerlukan surat kuasa penuh oleh Presiden dalam melakukan perundingan atau menerima suatu naskah perjanjian dikarenakan memiliki jabatan sebagai Menteri. Hal tersebut dapat dilakukan karena dalam pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 24 tahun 2000 berbunyi “pejabat yang tidak

⁴ Boer Mauna, **Hukum Internasional**, Alumni, Bandung, 2001. Hlm 100

memerlukan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud ayat 1 angka adalah: a). Presiden dan b). Menteri”.

Setelah melalui proses perundingan oleh perwakilan Indonesia dan Arab Saudi atas naskah *agreement* tersebut, maka dilanjutkan dengan melakukan tahap selanjutnya yaitu penerimaan atau pengadopsian naskah perjanjian. Tahap ini menunjukkan bahwa para pihak yang melakukan perundingan telah berhasil mencapai kesepakatan atas naskah perjanjian, meskipun naskah itu belum merupakan kesepakatan final atau belum merupakan naskah yang definitif.⁵ Pasal 9 Konvensi Wina 1969 menentukan:

- a) Penerimaan naskah ditentukan dengan persetujuan dari semua peserta (secara suara bulat) atau;
- b) Mayoritas dua pertiga dari peserta yang hadir yang memberikan suara.

Dalam suatu perjanjian internasional yang bersifat bilateral maka penerimaan naskah perjanjian secara bulat bagi para pihak sangat mudah dicapai. Hal tersebut dikarenakan peserta perjanjian hanya terdiri dari dua pihak. Apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan atas naskah perjanjian, maka kedua belah pihak dapat melakukan pengadopsian naskah perjanjian dan melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pengotentikasian atas naskah perjanjian.

Dalam *agreement* ini, tahap penerimaan dan atau pengadopsian naskah perjanjian dan tahap pengotentikasian atau pengesahan naskah perjanjian digabungkan menjadi satu. Penerimaan naskah perjanjian sekaligus juga merupakan pengotentikasian naskah perjanjian tersebut. dengan penggabungan kedua tahap ini maka efisiensi dalam proses lahirnya *agreement* ini menjadi tercapai dan demikian pula lahirnya *agreement* semakin cepat.

Setelah melalui tahap pengadopsian dan pengotentikasian naskah perjanjian, maka dapat dilanjutkan pada tahap persetujuan untuk terikat pada perjanjian (*Consent to be bound by a treaty*). Persetujuan untuk

⁵ I Wayan Parathiana, **Pengantar Hukum Internasional**, Mandar Maju, Bandung, 2003. Hlm 106

mengikatkan diri pada perjanjian dapat dilakukan dengan suatu penandatanganan, ratifikasi, pernyataan turut serta atau menerima suatu perjanjian. Negara dapat mengikatkan diri dengan penandatanganan perjanjian tanpa ratifikasi apabila hal itu memang menjadi maksud para peserta. Maksud demikian dapat tercantum dalam perjanjian itu sendiri atau para peserta dengan cara lain telah bersepakat bahwa perjanjian itu akan berlaku setelah ditandatangani tanpa menunggu ratifikasi.⁶

Dalam pembuatan *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* lebih sederhana dibandingkan dengan tahap-tahap yang telah dijelaskan diatas. Sebelumnya, nomenklatur *agreement* ini adalah *MoU* sebagai perjanjian pendahuluan atau pra-kontrak perjanjian sebelum ditandatangani oleh para pihak. Perwakilan Indonesia dan Arab Saudi melakukan perundingan dalam menyusun naskah *MoU* tersebut. setelah naskah selesai dibuat, maka dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci.

Setelah kedua negara telah sepakat untuk terikat terhadap *MoU* tersebut, maka dapat dilakukan dengan penandatanganan, ratifikasi, atau menerima *MoU* tersebut. Dalam hal ini, kedua negara melakukan persetujuan dengan cara penandatanganan saja tanpa melakukan ratifikasi. Tidak dilakukannya tahap ratifikasi oleh Indonesia dikarenakan materi yang terdapat dalam isi *agreement* tersebut memiliki ruang lingkup yang kecil dan tidak menyangkut haluan negara. Oleh karena itu tidak diperlukan ratifikasi atau persetujuan dari DPR.

b. Format *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*

Menurut Boer Mauna dalam penulisan naskah perjanjian terdiri dari mukadimah, batang tubuh, klausa-klausa penutup dan annex. Dalam mukadimah biasanya mulai dengan menyebutkan negara-negara peserta. Dalam batang tubuh terdiri dari isi perjanjian itu sendiri yaitu berupa pasal-pasal. Klausa penutup berisi mengenai mekanisme pengaturan

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, **Pengantar Hukum Internasional**, Alumni, bandung, 2012, Hlm 129

seperti mulai berlaku, syarat-syarat berlaku, lama berlakunya perjanjian, amandemen, revisi, akses dan lain-lainnya. Annex berisi ketentuan-ketentuan teknis atau tambahan mengenai satu pasal atau keseluruhan perjanjian dan terpisah dari perjanjian.

Mukadimah yang terdapat dalam *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*, berbunyi:

“the Government of the Republic of Indonesia represented by the Ministry of Manpower and Transmigration and The Government of the Kingdom of Saudi Arabia represented by the Ministry of Labour hereinafter referred by singulary as the “party” and colectivaly as “the Parties”.

“ Pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi diwakili oleh Kementerian Tenaga Kerja selanjutnya masing-masing disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut para pihak”

Mukadimah *agreement* tersebut menyebutkan bahwa pihak-pihak peserta dalam perjanjian ini adalah Pemerintah Indonesia yang diwakili Kementertian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemerintah Arab Saudi yang diwakili Kementerian Tenga Kerja.

Selain menyebutkan para pihak peserta dalam perjanjian, mukadimah juga berisi pernyataan-pernyataan umum perjanjian yang kadang-kadang merupakan program politik dari negara-negara peserta.⁷ Dalam *agreement* ini pernyataan tersebut di tuangkan dalam kalimat ssebagai berikut :

“desiring to Promote the existing cooperation through coopertion in the field of labour based on principles of mutual benefis, mutual respect, fairness and transparency”.

“berkeinginan untuk meningkatkan kerjasama yang telah terjalin melalui kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, saling menghormati, keadilan dan keterbukaan”.

Dalam kalimat tersebut dinyatakan pembuatan perjanjian diperuntukan meningkatkan kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan

⁷ Boer Mauna, op. Cit. 106

berdasarkan prinsip saling menguntungkan, saling menghormati, keadilan dan keterbukaan.

Setelah mukadimah dalam *agreement* tersebut, dilanjutkan dengan kalimat yang menyatakan bahwa para pihak telah menyetujui berbagai hal yang dituangkan dalam batang tubuh. Dalam batang tubuh *agreement* ini terdiri dari sembilan pasal dimana Arab Saudi sebagai pihak pertama dan Indonesia sebagai pihak kedua dalam perjanjian. Poin-poin dalam Kesembilan pasal tersebut berisi tentang tujuan, hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian sengketa atas pelanggaran perjanjian, masa berlaku perjanjian, amandemen dan pengakhiran perjanjian.

Setelah pasal-pasal perjanjian telah dituangkan dalam batang tubuh, dilanjutkan dengan klausa-klausa penutup yang juga merupakan bagian dari batang tubuh. Klausa penutup dalam *agreement* ini dituangkan dalam kalimat

“in witness whereof, the undersigned being duly authorized there to by their respective Governments, have signed this Agreement. Done in duplicate, in Riyadh on the 19th of February 2014 in Indonesian Arabic, And English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevall”.

“sebagai bukti, yang bertandatangan dibawah ini, telah diberi kuasa oleh pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani persetujuan ini. Dibuat rangkap dua, di Riyadh pada tanggal Sembilan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Empat Belas dalam Bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran persetujuan ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku”.

c. Mulai berlakunya *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional

Dalam pemberlakuan dari *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*, para pihak yakni, Indonesia dengan Arab Saudi telah sepakat bahwa berlakunya *agreement* yang telah

dibuat berlaku sejak tanggal pemberitahuan terakhir. Hal tersebut tuang dalam pasal delapan ayat satu *agreement* tersebut yang berbunyi: *this agreement shall be effective as of the date of the later notification*. Tanggal yang dilakukan dalam penandatanganan sebagai proses akhir kesepakatan atas persetujuan ini yaitu tanggal 19 Februari 2014. Maka, *agreement* ini telah berlaku dan mengikat para pihak sejak tanggal tersebut. Pemberlakuan *agreement* tersebut adalah praktek dari pasal 24 Konvensi Wina 1969 dimana para pihak bebas untuk menentukan sendiri kapan mulai berlakunya *agreement* tersebut yang disesuaikan dengan isi dan sifat persetujuan yang telah dibuat.

d. Akibat Hukum Atas Berlakunya *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers Terhadap Para Pihak Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional*

Setiap perjanjian melahirkan hubungan hukum berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang terikat pada perjanjian itu. Demikian pula dari sejak perundingan untuk merumuskan naskah perjanjian, pemberlakuan, pelaksanaannya dengan segala permasalahan yang timbul serta pengakhiran berlakunya perjanjian, seluruhnya tunduk pada hukum internasional maupun hukum perjanjian internasional.⁸

Hak dan kewajiban yang timbul dari lahirnya suatu perjanjian internasional didasari atas *asas pacta sunt servanda* yang menyatakan perjanjian mengikat para pihak dan menjadi hukum yang berlaku bagi para pihak. Sifat mengikat ini berarti negara pihak suatu perjanjian harus menaati dan menghormati pelaksanaan perjanjian tersebut. pasal 26 konvensi wina 1969 menyatakan *every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good fath*. Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian yang mengikat negara pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini merupakan dasar pokok hukum perjanjian dan telah diakui secara universal yang merupakan bagian dari *general principle of law*.

⁸ I Wayan Phartiana, **Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1**, Mandar Maju, bandung, 2002, . Hlm 17-18

e. Berakhirnya *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* Berdasarkan Perjanjian Internasional

Dalam *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*, tentang hal berakhirnya *agreement* tersebut tercantum dalam pasal 8 (delapan) ayat (2) dan (3). Pasal 2 berbunyi:

“This agreement shall be in force for a period of 3 (three) years and automatically renewable for the same periods unless either party notify in writing its intention to terminate this agreement 2 (two) months prior to its expiration”

Ayat 2 (dua) tersebut menyatakan bahwa *agreement* berlaku dalam waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperbarui secara otomatis. Tetapi apabila salah satu pihak ingin mengakhirinya setelah tiga tahun, maka *agreement* dapat berakhir.

Sedangkan dalam ayat 3 (tiga) yang berbunyi:

“Either party may terminate this agreement at any time by giving written notification to the other party 6 (six) months in advance of the intended date of terminate”

Dalam ayat 3 (tiga) menyatakan bahwa salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa perjanjian ini berakhir. Cara dapat dilakukan untuk mengakhiri *agreement* ini menurut pasal tiga adalah dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain 6 (bulan) sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.

2. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap TKI Di Arab Saudi Berdasarkan *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*

a. Kewajiban para pihak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap TKI

Dalam pasal dua huruf (a) *agreement* ini menyatakan bahwa para pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, dengan cara yang telah ditetapkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang juga termasuk norma-norma internasional, untuk menjamin perlindungan yang efektif dan setara terhadap hak tenaga

kerja sektor domestik dan para pemberi kerjanya, termasuk hak untuk memperoleh upaya hukum yang efektif yang ada dalam sistem hukum mereka guna perlindungan hak-hak yang dimaksud.

Dalam pasal dua huruf (a) tersebut, para pihak wajib menjamin perlindungan yang efektif terhadap hak TKI dan juga termasuk hak untuk mendapat upaya hukum yang efektif yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan yaang berlaku termasuk hukum internasional. Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam hukum nasional Indonesia yang mengatur perlindungan TKI adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004. Dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 39 Tahun 2004, hak-hak TKI antara lain:

- a) Bekerja diluar negeri;
- b) Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
- c) Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
- d) Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
- e) Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
- f) Memperoleh hak, kesempatan dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- g) Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
- h) Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal.

Mengenai hak memperoleh upaya hukum diatur dalam pasal 85 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan pelaksana penempatan TKI swasta mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah;
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah.

Selain Undang-Undang nomor 39 Tahun 2004, norma-norma hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia mengatur hal-hal yang terkait dalam perlindungan hak TKI yaitu Konvensi ILO dan Konvensi PBB 1990 tentang Hak Buruh Migran Dan Keluarganya. Dalam konvensi ILO perlindungan hak TKI diatur dalam Konvensi ILO Nomor 100, 105 dan 111.

Pasal 3 ayat (3) Konvensi ILO Nomor 100 mengenai pengupahan bagi laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya yang berbunyi: dengan jalan yang sepadan dengan cara yang berlaku untuk menetapkan nilai pengupahan, tiap anggota harus memajukan dan sesuai dengan cara itu menjamin pelaksanaan asas pengupahan yang sama bagi pekerja/buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama.

Pasal 1 Konvensi ILO nomor 111 mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan berbunyi: perbedaan pengecualian atau pilihan bentuk apapun juga mengenai suatu tugas tertentu yang didasarkan atas persyaratan khas tugas itu tidak dianggap sebagai suatu diskriminasi. Untuk tujuan konvensi ini istilah pekerjaan dan jabatan meliputi kesempatan pelatihan keterampilan, kesempatan

memperoleh pekerjaan dan kesempatan memperoleh jabatan tertentu, serta ketentuan dan syarat kerja.

Pasal 1 Konvensi ILO nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa mengamanatkan bahwa kerja paksa tidak boleh dilakukan dalam bentuk apapun untuk:

- a) Sebagai cara penekanan/pendidikan politik atau sebagai hukum atas pemahaman/ Pernyataan pandangan politik atau secara ideologis pandangan yang bertentangan dengan sistem politik, sosial, ekonomi yang sah;
- b) Sebagai cara untuk mengerahkan dan menggunakan tenaga kerja untuk bermaksud pembangunan ekonomi;
- c) Sebagai cara untuk membina disiplin tenaga kerja;
- d) Sebagai hukuman karena keikutsertaan dalam pemogokan;
- e) Sebagai pelaksanaan diskriminasi, rasial, sosial, serta bangsa dan agama.

b. Kewajiban Pihak Pertama (Pemerintah Arab Saudi) Dalam Memberikan Perlindungan Hak TKI

Kewajiban pihak pertama tercantum dalam pasal 3 huruf (a) sampai dengan (h) *agreement* ini yaitu:

- (a) Mengawasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan dari semua ketentuan yang ada dalam kontrak kerja antara pemberi kerja dan tenaga kerja sektor domestik;
- (b) Memastikan pemenuhan hak tenaga kerja Indonesia sektor domestik untuk memegang sendiri dokumen perjalanannya, dokumen identitas atau dokumen pribadi lainnya dalam keadaan apapun kecuali dalam hal penyitaan yang telah diperintahkan oleh pengadilan Arab Saudi, dan bebas berkomunikasi dengan keluarga mereka;

- (c) Menerbitkan kartu identitas yang sah setelah kedatangan seorang tenaga kerja Indonesia sektor domestik sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (d) Berupaya untuk mensyaratkan para majikan menyediakan suatu skema asuransi dalam rangka melindungi hak tenaga kerja Indonesia sektor domestik dan kepentingan pemberi kerjanya;
- (e) Memfasilitasi pembukaan suatu rekening bank oleh majikan atas nama tenaga kerja Indonesia sektor domestik untuk menyimpan pendapatnya seperti telah ditentukan dalam kontrak kerja;
- (f) Berupaya untuk membentuk suatu mekanisme yang akan menyediakan bantuan 24 jam untuk tenaga kerja Indonesia sektor domestik;
- (g) Memfasilitasi pelaksanaan perlindungan dan bantuan kekonsuleran yang diberikan oleh misi diplomatik atau konsuler Indonesia, dengan memberi informasi tentang tenaga kerja Indonesia sektor domestik yang ditangkap atau dipenjara atau ditahan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (h) Memfasilitasi repatriasi tenaga kerja Indonesia sektor domestik dalam penyelesaian kontrak, keadaan darurat atau sesuai dengan kebutuhan, termasuk penerbitan visa keluar.

Ada beberapa pasal dalam konvensi PBB 1990 yang berkaitan dengan pasal 3 (tiga) *agreement* tersebut. Pasal antara lain adalah:

- a) Pasal 3 (tiga) huruf (b) *agreement* mengenai dokumen dan penyitaannya TKI dengan pasal 21 Konvensi PBB yang berbunyi: selain oleh pejabat publik yang diberi kewenangan oleh hukum, perbuatan seseorang yang menghancurkan atau mencoba menghancurkan dokumen identitas, dokumen yang memberi ijin masuk atau keluar, tempat kediaman, atau tempat tinggal dalam wilayah nasional atau ijin kerja merupakan tindakan melawan hukum. Penyitaan tanpa hak atas dokumen-

dokumen tersebut, tidak boleh dilakukan tanpa adanya bukti resmi yang terperinci.

- b) Pasal 3 (tiga) huruf (g) *agreement* mengenai bantuan diplomatik atau konsuler terhadap TKI yang ditangkap dengan pasal 7 Konvensi PBB 1990 yang berbunyi: apabila seorang buruh migran dan anggota keluarganya ditangkap atau dimasukkan kedalam penjara atau tahanan selama menunggu untuk diadili atau ditahan dalam bentuk lain, maka: (a) konsuler atau pejabat diplomatik Negara asalnya atau negara tersebut, harus diberitahukan dengan segera mengenai penangkapan atau penahanan tersebut beserta alasan-alasannya, apabila yang bersangkutan memintanya.
- c) Pasal 3 (tiga) huruf (c) *agreement* mengenai kartu identitas TKI dengan pasal 16 ayat 3 (tiga) yang berbunyi: Verifikasi oleh petugas penegak hukum mengenai identitas buruh migran dan anggota keluarganya harus disesuaikan dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

c. Kewajiban Pihak Kedua (Pemerintah Indonesia) Dalam Meberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak TKI

Kewajiban pihak kedua tercantum dalam Pasal 4 huruf (a) sampai dengan (e) *agreement* tersebut yaitu:

- (a) Mensyaratkan bahwa calon TKI sektor domestik berumur antara 21-55 tahun;
- (b) Memastikan bahwa calon TKI sektor domestik tidak memiliki catatan kriminal;
- (c) Menyediakan pelatihan bagi TKI sektor domestik dengan keahlian tertentu yang dibutuhkan sesuai dengan kontrak kerja, dan pengetahuan tentang budaya, adat istiadat dan praktik sosial di Arab Saudi;
- (d) Memastikan bahwa TKI sektor domestik memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Arab Saudi;

- (e) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi transportasi dari para tenaga kerja yang prospektif menuju kerajaan dalam waktu tidak melebihi 1 (satu) bulan dari tanggal penerimaan visa oleh agensi perekrutan di Indonesia.

Ada beberapa pasal yang berkaitan dalam pasal 4 *agreement* mengenai kewajiban pihak kedua dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Konvensi ILO. Pasal-pasal tersebut antara lain:

- a) Pasal 4 huruf (a) *agreement* mengenai batas umur TKI dengan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang berbunyi: perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu tahun).
- b) Pasal 4 huruf (a) *agreement* mengenai batas umur dengan pasal 3 ayat 1 (satu) Konvensi ILO nomor 138 yang berbunyi: usia minimum masuk kerja tiap jenis pekerjaan atau kerja yang karena sifatnya atau karena keadaan lingkungan dimana pekerja itu dilakukan mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral orang muda tidak boleh kurang dari 18 tahun.
- c) Pasal 4 huruf (c) *agreement* mengenai penyediaan pelatihan dengan pasal 42 ayat 1 (dua) undang-undang nomor 39 tahun 2004 yang berbunyi: calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan
- d) Pasal 4 huruf (e) *agreement* mengenai fasilitas keberangkatan TKI dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang berbunyi: pemerintah wajib menyediakan pos-pos pelayanan di pelabuhan pemberangkatan dan pemulangan TKI yang dilengkapi dengan fasilitas yang memenuhi syarat.

Berdasarkan analisis diatas, klausa-klausa yang terdapat dalam *Agreement The Placement and Protections of Indonesian Domestic Workers* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap TKI Di Arab Saudi antara lain adalah perlindungan dalam perekrutan, penempatan, penetapan standar kontrak, pengawasan, bantuan kekonsuleran, pelatihan, penyimpanan dokumen, asuransi, dan transportasi. Namun *agreement* tersebut masih memiliki kekurangan dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap TKI yang terdapat dalam hukum nasional dan internasional yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Konvensi ILO dan Konvensi PBB 1990. Kekurangannya antara lain adalah tidak adanya jaminan TKI atas kekerasan fisik atau penyiksaan, perbudakan, kesehatan, hak berorganisasi serta kepengurusan TKI kelebihan masa tinggal dan TKI meninggal.

A. Kesimpulan

1. *Agreement The Placement and Protections of Indonesian Domestic Workers* telah memiliki kekuatan hukum mengikat pada kedua belah pihak. Hal tersebut karena dari proses perumusan atau perundingan, penerimaan naskah dan sampai dengan persetujuan untuk terikat kepada perjanjian telah dipenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000. Selain itu unsur-unsur formal dalam *agreement* telah tersusun dengan baik dan sistematis yaitu dari mukadimah, batang tubuh sampai dengan klausa penutupnya. Oleh karena itu apabila ada salah satu pihak dalam *agreement* melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati maka dapat dipertanggung jawabkan.
2. Perlindungan hukum terhadap TKI yang terdapat dalam *Agreement The Placement and Protections of Indonesian Domestic Workers* antara lain perlindungan dalam perekrutan, standar kontrak kerja, pengawasan, bantuan kekonsuleran, penyimpanan dokumen, asuransi, serta fasilitas transportasi. Namun *agreement* tersebut masih memiliki kekurangan dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap TKI yang terdapat dalam hukum nasional dan internasional yaitu Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2004, Konvensi ILO dan Konvensi PBB 1990. Kekurangannya antara lain adalah tidak adanya jaminan TKI atas kekerasan fisik atau penyiksaan, perbudakan, kesehatan, hak berorganisasi serta kepengurusan TKI kelebihan masa tinggal dan TKI meninggal. Oleh karena itu *agreement* tersebut belum memberikan perlindungan hukum secara maksimal dengan masih adanya TKI yang bermasalah sampai dengan bulan Agustus 2014 sebanyak 630 kasus.

B. Saran

1. Dalam pembuatan perjanjian internasional berupa nomenklatur *agreement*, pemerintah melakukan pengkajian yang terhadap kesepakatan-kesepakatan yang akan dibuat dan disesuaikan dengan asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian internasional. Selain itu diharapkan pemerintah tetap meratifikasi perjanjian internasional meskipun nomenklturnya adalah *MoU* atau *agreement*, Sehingga *agreement* yang telah dibuat masuk dalam peraturan perundang-undangan nasional dan memiliki kekuatan hukum yang kuat serta dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap TKI di Arab Saudi, pemerintah dapat konsisten dalam melaksanakan isi yang terdapat dalam pasal-pasal *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*. Sehingga hak-hak TKI di Arab Saudi dapat terjamin dan mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan dari dibuatnya *agreement* tersebut. selain itu diharapkan dalam membuat perjanjian bilateral mengenai perlindungan TKI dengan Arab Saudi atau negara lainnya, pemerintah lebih memperhatikan keselamatan TKI dalam hal penyiksaan atau kekerasan fisik, TKI ilegal dan *overstayer* yang akhir-akhir ini sering terjadi di Arab Saudi ataupun di negara penempatan TKI lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian sutedi, **Hukum Perburuhan**, Sinar Grafika, jakarta, 2011.
- Boer Mauna, **Hukum Internasional**, Alumni, Bandung, 2001.
- I Wayan Parathiana, **Pengantar Hukum Internasional**, Mandar Maju, bandung, 2003.
- , **Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1**, Mandar Maju, bandung, 2002
- Mochtar Kusumaatmadja, **Pengantar Hukum Internasional**, Alumni, bandung, 2012.
- Lalu Husni, **Dasar-dasar Hukum Perburuhan**, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445 tahun 2004.
- Undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang ratifikasi *convention on the elimination of all forms of discrimination againts women*;
- Undang-undnag nomor 19 tahun 1999 tentang pengesahan *ilo cinvention no. 105 concerning the abolition of forced labour*;
- Undang-undang nomor 20 tahun 1999 pengesahan *ilo convention no. 138 concerning minimum age for admission to employment*;
- Undang-undang nomor 1 tahun 2000 pengesahan *ilo convention no 182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of children labour*;
- Undang-undang no 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomer 185.
- Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional.
- Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya.

INTERNET.

- BNP2TKI, 2012, **RI - Arab Saudi Tandatangani MoU Perlindungan TKI** (online), <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/6284-ri-arab-saudi-tandatangani-mou-perlindungan-tki.html>, diakses pada tanggal 31 agustus 2014.
- Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementrian Luar Negeri, **Statistik Penanganan Kasus** (online), http://perlindungan.kemlu.go.id/portal/shortcut/statistik_penanganan_kasus, diakses pada tanggal 23 september 2014.